

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur

Endra Gunawan

Dosen Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang
(STIES) Banda Aceh

Abstrak. Pelaksanaan otonomi suatu daerah merupakan wujud kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS, menunjukkan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. (2) efektivitas penerimaan pungutan daerah dalam periode 2011-2015 berada pada tingkat yang cukup efektif. (3) efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$. (4) efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract. The implementation of regional autonomy is a manifestation of independence in implementing regional autonomy can be seen from the receipt of Regional Original Revenue, local taxes and retribution is one of the largest sources of income to increase Regional Original Revenue. This study aims to look at the level of effectiveness of regional tax revenues and levies as well as their effect on Regional Original Income in East Aceh District in 2011-2015. This study uses data collection techniques through documentation, namely secondary data in the form of Budget Realization Report of East Aceh District. Based on the results of data management using the SPSS application, it shows that (1) the effectiveness of local tax revenues during 2011-2015 is categorized as very effective. (2) the effectiveness of the receipt of regional levies within the period 2011-2015 is at a fairly effective level. (3) the effectiveness of local taxes has a significant effect on the Regional Original Income with a sig value. $0.001 < 0.05$. (4) the effectiveness of local taxes has a significant effect on Regional Original Income with a sig value. $0,000 < 0,05$.

Keywords: Effectiveness, Regional Taxes, Regional Retribution and Local Revenue.

*Corresponding author. Email: endragunawanr@gmail.com

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan.

Salah satu cara untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat yaitu dengan memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan melalui pemaksimalan pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: "Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab". Sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2013:12) pajak dan retribusi daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah belum efektif atau tidak terealisasinya dari target anggaran. Seperti Kabupaten Aceh Timur. Tahun 2012 pajak daerah Kabupaten Aceh Timur dianggarkan Rp4.932.000.000 dan realisasinya hanya Rp4.037.416.902. Begitu pula dengan realisasi penerimaan retribusi daerah yang belum mampu merealisasikan dari anggaran yang ditetapkan, seperti tahun 2013 retribusi yang dianggarkan sebesar Rp.12.406.264.172 tetapi yang terealisasikan

hanya sebesar Rp 8.368.291.093.

Tidak realisasinya anggaran yang di tetapkan menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Timur belum dikatakan efektif pada tahun 2011-2012. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Octovido et al., 2014). Berdasarkan uraian dimaksud fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pengaruhnya terhadap PAD pada Kabupaten Aceh Timur.

Tinjauan Referensi

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Halim (2007:96) menyatakan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Definisi PAD juga dikemukakan oleh Yani (2008:51) yaitu; Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang bersifat wajib atau dipaksakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu: 1) pajak hotel; 2) pajak restoran; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak parkir; 7) pajak air mineral bukan logam dan batuan; 8) pajak air tanah; 9) pajak sarang burung walet; 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 11) PBB perkotaan dan perdesaan. Pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu Negara, tetapi sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

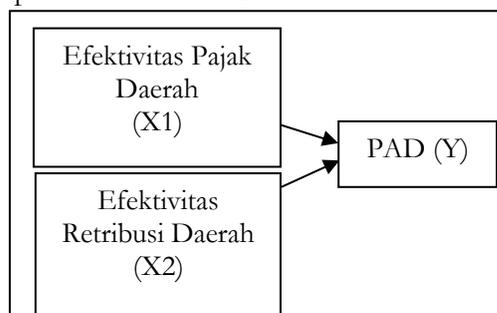
Retribusi Daerah

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi terbagi tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Menurut Halim (2004:115) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya didasari peraturan yang berlaku, dari beberapa definisi retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan wajib dari penduduk karena adanya jasa tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*, maksudnya adalah mengukur tingkat hasil akhir (tujuan) yang dicapai suatu program dari sejumlah *output* tertentu, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif kinerja Mahmudi (2007:102). Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2009:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Gambaran bagaimana efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta pengaruhnya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Timur. Dapat dilihat skema Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Berdasarkan penjelasan pada teori-teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka dapat diperkirakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun rincian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- H₁: Efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- H₂: Efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- H₃: Efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Metodologi Penelitian

Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau suatu hal yang menjadi kepentingan peneliti untuk investigasi (Sekaran & Bogie, 2013:240). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur. Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti (Sekaran & Bogie, 2013:241), sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil memiliki kriteria-kriteria tertentu Sugiyono (2013:124). Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang terdapat di dalamnya berupa target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah.
- 2) Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah.
- 3) Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur berdasarkan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2009:145), dan data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LRA diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2011-2015. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu: metode dokumentasi yang merupakan kumpulan data berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data dengan cara menelusuri dan mengunduh data yang dibutuhkan (Sekaran, 2006:77) dan studi pustaka, yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (Y)

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi” Yani (2008:51).

Efektivitas Pajak Daerah (X1)

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Mahmudi, 2010:144). Untuk melihat tingkat efektivitas pajak daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila yang dicapai sebesar satu atau seratus persen, Semakin tinggi efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
61-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Efektivitas Retribusi Daerah (X2)

Efektivitas retribusi daerah adalah perhitungan berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Puspitasari 2014) Rumus efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut (Putri 2016):

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
61-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, sebelumnya dilakukan analisis efektivitas dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan data sekunder yang berupa Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur. Data sekunder yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 17. Untuk melakukan analisis data sekunder perlu dilakukan uji statistik deskriptif dan Uji Asumsi Klasik.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Deskriptif data memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Musfiqon, 2012:170). Deskriptif data variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Data Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	5	23,3	109,2	82,982	34,6539
X1	5	81,8617	145,0342	111,782577	26,1424017
X2	5	92,6739	130,0462	124,235659	32,5784564
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data diolah (2017).

Pada tabel 3 menjelaskan bahwa PAD

merupakan variabel dependen (Y), sedangkan efektivitas pajak daerah merupakan variabel independen (X1) dan efektivitas retribusi daerah (X2). Pada variabel PAD memiliki nilai rata-rata Y sebesar 82,982 dengan nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 34,6539 menunjukkan bahwa data sebaran PAD mengindikasikan hasil yang baik. Nilai Y *Minimum* sebesar 23,3 dan Y *Maximum* sebesar 109,2. Variabel efektivitas pajak daerah (X1) memiliki nilai rata-rata 111,782577 dengan nilai standar deviasi sebesar 26,1424017. Nilai *Minimum* X1 adalah sebesar 81,8617 dan nilai *Maximum* X1 sebesar 145,0342. Selanjutnya variabel efektivitas retribusi daerah (X2) yaitu memiliki nilai rata-rata 124,235659 dengan nilai standar deviasi sebesar 32,5784564. Nilai *Minimum* dari variabel X2 yaitu sebesar 92,6730 dan nilai *Minimum* X2 yaitu sebesar 130,0462.

Uji Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan pada tahap awal ketika melakukan analisis data. Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160). Hal ini dapat dilihat melalui pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dalam pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test*, dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitasnya (nilai Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan probabilitasnya (nilai Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nilai pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* penelitian ini yaitu *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,918 berada diatas nilai signifikansi 0,05 (0,918 > 0,05), maka data residual berdistribusi normal. Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* sama seperti hasil pengujian grafik *normal probability plot* yaitu data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2009:95).

Hasil pengujian multikolinearitas diperoleh efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah > 0,1 yaitu sebesar 1,000. Nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10, variabel independen yaitu efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah berada disekitar 1,000 yang berarti kurang dari 10 (sepuluh). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada multikolonieritas atau tidak ada hubungan yang kuat antara variabel bebas (independen).

Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Hasil penelitian yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah uji *scatterplot* antara ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residual), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas angka 0 (nol) dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4. Regresi Linear Berganda

Y = 9.677 + 0,900X1 + 0,711X2 + e		
	1,603	2,503
t-value		
Sig. value	.001	.000
R = 0,851	R ² = 0,723	Adj. R ² = 0,701
F-value = 12,571 Sig. = 0,000		
*Signifikan pada α = 5%.		
** Signifikan pada α = 10%.		

Sumber: Data diolah (2017).

Koefisien Determinasi

Beberapa koefisien yang dijelaskan dari hasil regresi data dalam penelitian ini adalah koefisien determinasi, seperti nilai R, R² (R Square), dan

Adjusted R². Koefisien regresi (R²) mengukur besar persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

Uji t

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan Nilai koefisien regresi variabel efektivitas pajak daerah (X) adalah 0,900 bernilai positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai efektivitas pajak daerah (X1) maka akan meningkatkan pula nilai PAD (Y). Variabel efektivitas pajak daerah (X1) memiliki nilai *t*_{hitung} < *t*_{tabel} (1,603 < 3,182) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti berada bawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian hipotesis (Ho) ditolak dan hipotesis (Ha)

diterima. Variabel selanjutnya, Tabel 4.5 menunjukkan Nilai Retribusi daerah (X2) adalah 0,711 bernilai positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai Retribusi daerah (X2) maka akan meningkatkan pula nilai PAD (Y). Variabel Retribusi daerah (X2 memiliki nilai

t-hitung < t-tabel (2.503 < 3,182) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti berada bawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi daerah Kabupaten Aceh Timur berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian hipotesis (H₀) ditolak dan hipotesis (H₁) diterima.

efektif dan efektivitas terendah pada tahun 2012 dengan nilai persentase 81,86% yaitu cukup efektif. Efektivitas pajak daerah tahun 2011 sebesar 89,12% yaitu cukup efektif dan pada tahun 2015 sebesar 125,45% yaitu sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinilai sangat baik, karena target pajak daerah yang ingin dicapai terealisasikan. Efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Target pajak daerah	Realisasi pajak daerah	Efektivitas Pajak Daerah	Keterangan
2011	4.841.000.000	4.314.082.969	89,12%	cukup efektif
2012	4.932.000.000	4.037.416.902	81,86%	cukup efektif
2013	3.722.000.000	4.371.450.662	117,45%	sangat efektif
2014	4.916.000.000	7.129.879.239	145,03%	sangat efektif
2015	6.402.000.000	8.031.473.347	125,45%	sangat efektif
Rata-rata			111,78%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah (2017).

Uji F

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diperoleh hasil uji F. Nilai F sebesar 12,571 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai signifikansi $F < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu efektivitas pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran nilai PAD Kabupaten Aceh Timur

Pembahasan Hasil Penelitian

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan membagi realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah kemudian dikali 100%. Efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 111,78% berdasarkan pada kriteria dalam persentase adalah sangat efektif. Efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan yang mencolok terjadi di tahun 2014 ke tahun 2015 tetapi masi dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi berada di tahun 2014 dengan nilai persentase 145,03% berada pada kriteria sangat

Efektivitas Retribusi Daerah.

Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2011-2015 masih tergolong rendah. Rata-rata efektivitas retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun sebesar 83,36% yaitu masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan retribusi daerah digali secara maksimal sehingga penerimaan efektivitasnya dikategorikan sangat efektif yaitu sebesar 105,54% dan 114,10%, tetapi tahun berikutnya efektivitas retribusi daerah menurun bahkan tahun 2014 penerimaan efektivitas retribusi daerah dikategorikan tidak efektif. Artinya Pemerintah Aceh Timur belum mampu menggali retribusi daerah secara maksimal dalam memanfaatkan PAD. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015.

Tahun	Target retribusi daerah	Realisasi retribusi daerah	Efektivitas retribusi Daerah	Keterangan
2011	2.609.000.000	2.753.607.023	105,54%	Sangat Efektif
2012	3.425.000.000	3.907.879.845	114,10%	Sangat Efektif
2013	12.406.264.172	8.368.291.093	67,45%	Kurang Efektif
2014	41.108.030.357	21.145.233.035	51,44%	Tidak Efektif
2015	38.449.213.387	30.101.828.434	78,29%	Kurang Efektif
Rata-rata			83,36%	Cukup Efektif

Sumber: data diolah (2017).

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015 dikategorikan sangat efektif dengan nilai sebesar 111,78%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinilai sangat baik, karena target pajak daerah yang ingin dicapai terealisasi.
2. Rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015 dikategorikan cukup efektif yaitu sebesar 83,36%. Hal ini dikarenakan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penggalian potensi retribusi daerah belum maksimal.
3. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Timur
4. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Timur

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara efektif serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja pemungutan pajak daerah serta dapat juga dengan mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
2. Bagi pemerintah daerah sebaiknya juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi.
3. Bagi pemerintah daerah sebaiknya dalam proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya memperhatikan

potensi yang ada sebenarnya, sehingga pemungutannya akan terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel seperti dana Otsus, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya membahas efektivitas saja, tetapi membahas efisiensi dan kontribusi dalam penerimaan pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy., Ramadhaniatun Nazry. 2014. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah (penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan). Makalah disajikan pada Koferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) I, yang diselenggarakan oleh IAI KPAD Wilayah DKI Jakarta & Banten, di Universitas Mercu Buana, Jakarta: 27 Februari 2014.
- Aceh Timur. 2015. statis-17-datageografis. URL: <http://acehtimurkab.go.id/statis-17-datageografis.html>. Diakses Tanggal 20 Oktober 2017.
- Anggareni, Diana. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Semarang.
- Ahmad, Yani. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Awaliyah, Fadilatun. 2016. Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Ppkad Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014. Skripsi. Universitas Dian Nuswanto. Semarang.
- Damaiyanti, Ni Putu Dian & Setiawan, Ery Putu I. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap

- PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana.9.1 (2014): 97-105.
- Damanik, Khairul Ikhwan, et al., 2012. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia. Jakarta: YOI.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Jakarta: Gema Pertama.
- Hanipah, Septiani dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013). E-proceeding of management. Vol.2, No. 3. 2015
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- _____. 2007. Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hanipah, Septiani dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013). E-proceeding of management. Vol.2, No. 3. 2015.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327. 1996. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Kusuma, Made Krisna Arta Anggar dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2013. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 5.3 (2013):652-665.
- Lianawati, Afita. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. Jurnal Economics Development Analysis Journal. 4 (3). 2015.
- Maharani, Triana. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan daerah. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Octovido, Irsandy., Sudjana, Nengah & Devi Farah Azizah. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). JAB. Vol. 15. No.1. Oktober 2014.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putriani, Eka. 2016. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Skripsi.

- Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Religia, Destika., dan Dudi Pratomo. 2014. Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Sampai 2013. E-proceeding of management. Vol.1, no 3. 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Jakarta. Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. Research Methods For Business. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis: Edisi Ke Tujuh Belas. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. 2015. The Effectiveness of the Management of the Local Tax Revenue of the Government of Surabaya City. Journal Savap. Vol.6 (3). May 2015.
- Tang, Bo-sin, Siu-wai Wong & Sing-cheong Liu. 2011. Institutions, Property Taxation and Local Government Finance in China. Issues of Urban Studies, Vol. 48, No.5, pp: 847-875.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar.2008. Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utomo, Okta Sigit. 2013. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.